

BAB I

PENDAHULUAN

DASAR PEMIKIRAN

Kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) telah melahirkan beragam interpretasi dan analisis dari pelbagai sudut dan aspek tinjauan. Umumnya analisis dan tinjauan itu bercorak politik. Namun tidak pula sedikit yang mencoba meletakkan kasus ICMI dalam sudut pandang multidimensional, baik dari dimensi politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Sebagaimana halnya setiap peristiwa sosial selalu dapat didekati dari pelbagai sisi dan sudut tinjauan. Demikian pula halnya ICMI, sebagai kasus besar dengan potensi tersendiri, wajar apabila aneka ragam dimensi tinjauan dilakukan para analis, peneliti maupun peminat studi politik Islam kontemporer Indonesia.

Dari pelbagai corak tinjauan dan aneka ragam analisis yang mengemuka secara umum dapat dikelompokkan kedalam tiga perspektif dengan variasi dan nuansanya tersendiri⁽¹⁾. Pertama, yang melihat ICMI sebagai simbol dari gejala "islamisasi birokrasi" di Indonesia. ICMI adalah puncak gunung es yang menonjol dari gejala itu. Perspektif kedua, melihat sebaliknya, ICMI sebagai gejala "birokratisasi Islam", atau dalam istilah lebih lugas lagi, ia wujud nyata dari fenomena kootopsi ummat Islam oleh

¹. Dawam Rahardjo, ICMI antara Status Quo dan Demokratisasi, Mizan, Bandung, 1995 Hlm. 337.

pemerintah Orde Baru (ORBA). Sementara itu pandangan ketiga, melihat ICMI lebih sebagai gejala kebangkitan golongan menengah muslim yang mendesak kehadiran sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil Society*).

Ketiga konstruksi pandangan yang berbeda itu memiliki logika dan argumentasinya tersendiri. Perspektif pertama secara tepat mungkin barangkali seperti pernah diistilahkan oleh Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo almarhum dengan istilah "ijo royo-royo". Yakni terjadinya perubahan susunan anggota DPR/MPR maupun struktur susunan anggota kabinet pembangunan VI yang penuh dengan wajah baru dan tampak lebih "hijau". Hijau di sini metaforis, simbol dari keterwakilan umat Islam dalam birokrasi.

Perspektif pertama yang melihat kehadiran ICMI sebagai fenomena Islamisasi birokrasi maupun struktur politik ditolak oleh mereka yang lebih melihat ICMI sebagai wujud nyata kootopsi Islam oleh regim ORBA, atau lebih khusus lagi Soeharto. Dengan menyodorkan bukti-bukti analisis, menurut tokoh-tokoh pengemuka pandangan ini terdapat sejumlah argumentasi logis mengapa ICMI tidak tepat dijadikan bukti merebaknya apa yang disebut Islamisasi birokrasi. Salah satu yang populer dari mereka adalah William Liddle, selain juga Abdurrahman Wahid². Argumentasi itu menurut Liddle, pertama, tokoh-tokoh yang terakomodasi dalam sistem politik maupun birokrasi sebagai simbol warna "hijau" tidaklah sepenuhnya

² William Liddle, *ICMI dan Masa Depan Politik Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1995, Hlm. 202.

diakui kesiantriannya. Mereka tidak berangkat dari pergerakan Islam sebagai jaminan komitmen terhadap perjuangan Islam. Sehingga tidaklah tepat melihat kehadiran mereka di pentas politik atas dasar aspirasi Islam.

Kedua, Presiden Soeharto mengangkat mereka lebih dalam kerangka tujuan dan agenda politiknya sendiri, sebagaimana pula ia pernah mengangkat tokoh-tokoh sebelumnya semacam Benny Moerdani, Ali Murtopo maupun Soejdono Hoermardani³. Tokoh-tokoh ini seperti diketahui kini banyak mendapat sorotan kritis telah banyak merugikan kepentingan Islam politik pada masa-masa aktifnya.

Dengan kata lain oleh Liddle, kehadiran ICMI tidak dilihat sebagai faktor determinan dalam pentas politik maupun birokrasi sebagai bagian dari apa yang disebut Islamisasi. Sehingga lebih tepat memposisikan ICMI sebagai "kartu" yang dimainkan oleh Orde Baru (baca: Soeharto). Hal ini terjadi disebabkan telah terjadinya polarisasi dan friksi-friksi kekuatan di tubuh *inner circle* presiden. Aliansi lama yang merupakan sumber utama kekuatan itu secara perlahan mulai retak sehingga perlu mencari aliansi dengan kekuatan mayoritas yang tidak lain ummat Islam sendiri. Liddle sebagai seorang Indonesianis yakin betul bahwa berkenannya Soeharto terhadap ummat Islam dewasa ini lebih dikarenakan kebutuhan politik untuk menggantikan peran tokoh-tokoh sebelumnya dalam kerangka melanggengkan status quo. Pemikir lain yang pandangannya senafas dengan ini adalah Fahkri Ali. Dalam salah satu tulisannya,

³. Heru Cahyono, Peranan Ulama Dalam GOLKAR 1971-1980, Dari Pemilu sampai Malari, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1992, Hlm. 19.

ia meragukan (setidaknya secara teoritik) kontribusi ICMI dalam pembentukan civil society akibat terjadinya proses integratif ummat dengan state⁽⁴⁾

Kedua pandangan di atas, baik yang menempatkan ICMI sebagai gejala Islamisasi birokrasi maupun birokratisasi Islam ditolak oleh sejumlah tokoh, antara lain Dawam Raharjo, Nurcholis Madjid dan Syafi'i Anwar. Bagi Dawam, menempatkan ICMI sebagai semata-mata akibat tarik-menarik antara Islamisasi birokrasi atau kebutuhan aliansi baru Orde Baru terhadap ummat Islam sehingga ia sebatas "kartu" yang dimainkan untuk menjaga kelangsungan status quois sebagaimana dikatakan Liddle, adalah terlalu gegabah dan menyederhanakan persoalan. Perspektif demikian amat menafikkan proses reproduksi sosial dan dinamika sosial yang berlangsung di internal tubuh ummat Islam.

Di tubuh Ummat Islam telah terjadi dinamika tinngi akibat mobilitas vertikal kaum terpelajar muslim sejak awal Orde Baru. Mobilitas itu telah melahirkan kelas baru santri⁽⁵⁾. Artinya akibat langsung pembangunan selama pemerintahan Orde Baru telah pula membawa dampak sosial bagi ummat Islam. Kemajuan dalam bidang ekonomi, meski masih dapat diperdebatkan, telah berpengaruh bagi munculnya perubahan-perubahan di tengah masyarakat, tak terkecuali di kalangan ummat Islam. Berkat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya melahirkan lapisan masyarakat yang sadar

⁴. Fakhri Ali, *Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*, Makalah Pidato Politik dan renungan Akhir Tahun Forum Masika ICMI di LIPPI, 28 Desember 1994.

⁵. M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indoensia*, Paramadina, Jakarta, tahun 1996 Hlm. 19.

pendidikan. Kelompok inilah yang pada gilirannya makin memperbesar struktur lapis menengah terpelajar serta angkatan kerja terdidik.

Mobilitas sosial sebagai konsekwensi logis makin tebalnya lapis kelas santri terdidik menurut Nurcholis Madjid adalah faktor utama penyebab makin akomodatifnya birokrasi terhadap Islam. Sehingga kedekatan state terhadap Islam tidaklah semata-mata faktor eksternal akibat simpatik dan rasa kasihan, melainkan sudah merupakan keniscayaan sejarah dinamika kaum muslimin sendiri sebagai kekuatan potensial tak terhindarkan. Dengan teori "Booming Sarjana"⁽⁶⁾, Nurcholis mengilustrasikan proses mobilitas vertikal itu yang ditandai adanya perubahan orientasi di kalangan ummat dari orientasi bisnis ke dunia pendidikan. Hal itu berlangsung sejak dekade 50-an dengan mulai masuknya kaum muda santri ke dunia universitas sebagai media pendidikan baru dan tidak lagi terkonsentrasi pada lembaga keagamaan *an sich*. Bibit-bibit yang ditanam pada dekade lima puluhan ini mulai menampakkan tunas kiprahnya pada dekade tujuh puluhan dengan munculnya generasi baru produk universitas setingkat sarjana. Sebagian dari sarjana S-I ini melanjutkan jenjang studi mereka ke pelbagai universitas ternama yang tidak saja di dalam negeri, melainkan juga ke Perguruan-perguruan Tinggi terkemuka Eropa. Pada penghujung delapan puluhan terjadilah apa yang disebut dengan *booming* sarjana, atau "panen doktor". Generasi lapis doktor produk dekade delapan puluhan inilah yang banyak meramalkan

⁶. Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina, Jakarta, tahun 1992 hlm. i-x.

dan mempengaruhi tingkat wacana dalam dialog-dialog tematik mengenai Islam dan kebangsaan, dengan ide-ide segar dan progresif. Implikasinya, umat makin *well informed* dan pada gilirannya menggeser citra minor umat Islam di mata kekuasaan.

Berdasarkan kerangka itu, Syafi'i Anwar⁽⁷⁾ membuat kategori tipologi hubungan umat Islam dengan pemerintah ORBA kedalam tiga klasifikasi yang banyak diwarnai dialektika proses sosial dan berlangsung di tengah kompleksitas umat dalam dinamika sejarahnya. Pertama, ialah pola hubungan yang hegemonik antara Islam dan ORBA. Periode ini berlangsung sejak awal Orde Baru dibangun hingga dekade tujuh puluhan, ditandai dengan kuatnya negara yang secara idio-politik menguasai wacana pemikiran sosio-politik di kalangan masyarakat serta terjadinya berbagai ketegangan dan bahkan konflik antara ORBA dan Islam.

Periode kedua berlangsung pada dekade delapan puluhan dimana hubungan itu berlangsung secara resiprokal. Yaitu mulai terjadinya saling pemahaman (*mutual understanding*) timbal balik serta pengertian di antara kedua belah pihak. Hal itu karena negara makin menyadari bahwa Islam merupakan kekuatan sosial politik yang tak dapat dikesampingkan. Memarginalisasi peran umat dalam kebijakan pembangunan dengan demikian merupakan tindakan yang kontra produktif. Terutama setelah muncul realitas bahwa kalangan Islam yang *nota bene* merupakan produk ORBA memiliki posisi intelektual dan kecakapabn teknikal yang dapat diandalkan untuk mendukung suksesnya pembangunan.

⁷. M. Syafi'i Anwar, *Op.cit.* hlm. 99.

Akhirnya pada dekade sembilan puluhan puncak dari gunung es sejumlah proses sosial politik yang berlangsung dari dekade-dekade sebelumnya menemukan momentum sinergisnya dalam bentuk hubungan saling merangkul dan mengakomodasi. Hal ini dibuktikan dengan semakin akomodatifnya birokrasi ORBA terhadap Islam, yang antara lain ditandai dengan lahirnya beberapa produk kebijakan penting yang menunjukkan tingkat responsitas state terhadap Islam. Salah satu dari wujud riil responsi itu adalah berdirinya ICMI pada 1990.

Dengan logika-logika dan argumentasi-argumentasi di atas sekiranya dapat dijelaskan pandangan yang menegaskan bahwa "mesranya" relasi Islam-kekuasaan dewasa ini tidaklah semata-mata akibat determinasi satu faktor, yaitu birokrasi ORBA memerlukan kekuatan mayoritas sekedar berfungsi untuk melegitimasi status quois. Namun juga yang tak terabaikan adalah diakibatkan proses reproduksi sosial yang berlangsung secara internal di tubuh ummat sendiri.

Resiprokalitas dinamika itu tidak saja terjadi secara struktural akibat mobilitas vertikal generasi muda muslim terdidik ke dalam birokrasi melalui proses pengintegrasian diri, melainkan juga secara horisontal melalui integrasi kultural. Di sinilah thesis Geertz^(*), seperti tercermin dalam bukunya yang amat monumental itu, *THE RELIGION OF JAVA*, mulai kehilangan relevansi dan kredibilitas untuk menjelaskan perbedaan dan ketegangan kultural yang pernah begitu mendalam terjadi

^{*} Cliffordz Geertz, dalam Roland Roberston, Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, Rajawali Pers, Jakarta, tahun 1992, hlm. 201.

dalam tradisi keberagamaan masyarakat Jawa. Cliffordz Geertz yang mengungkapkan polarisasi tersebut sekitar empat dasawarsa yang lalu dengan menganggap bahwa abangan dan santri sebagai dua agama yang berbeda. Kini orang dapat mengatakan bahwa ketegangan itu tidak lagi menjadi isu yang berarti. Menurut Kuntowijoyo⁽⁹⁾, juga Syafi'i Anwar⁽¹⁰⁾, mencairnya dikotomi antara dua keberagamaan yang cenderung konflikual itu antara lain diakibatkan perubahan sosial yang didorong oleh dinamika pendidikan dan sosialisasi politik secara simultan. Mobilitas yang tinggi, baik secara horisontal maupun vertikal telah memungkinkan terjadinya kontak antara abangan dan santri, sehingga interaksi intensif anak-anak dari kedua sekte budaya itu terjadi melalui pendidikan nasional yang memperlakukan agama sebagai pelajaran wajib untuk seluruh siswa sejak tingkat dasar hingga universitas.

Perpaduan dialektis antara di satu sisi mobilitas vertikal dan mobilitas horisontal di sisi lain pada saatnya akan melahirkan apa yang oleh Cak Nur disebut dengan *National Equilibrium* ⁽¹¹⁾, yaitu berupa tatanan sosial yang ditandai

⁹. Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Mizan, Bandung, 1989, hlm. 51.

¹⁰. Disebutkan oleh Syafi'i Anwar, kebijakan itu tertuang dalam Surat keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri) 5 Juni 1975. SKB itu memutuskan ; 1. pelajaran agama dijadikan mata pelajaran wajib bagi sekolah-sekolah umum sekurang-kurangnya diberikan 2-3 jam setiap minggu. 2. menetapkan proporsi dan komposisi kurikulum bagi Madrasah adalah 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. 3. Menetapkan bahwa lulusan Madrasah memenuhi syarat dan berhak melanjutkan sekolahnya pada jenjang pendidikan lebih tinggi pada sekolah-sekolah umum. Keputusan ini menurut Anwar, merupakan pendorong bagi pesatnya pendidikan agama dan menjadikannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

¹¹. Ceramah Nurcholis Madjid di Hotel Wenstin, tgl, 21 Juli 1996.

11

yaitu untuk mengembangkan konsep ilmu-ilmu sosial yang bersifat "holistik" dan mengacu pada perubahan sosial yang tidak menafikkan proses sejarah dan budaya masyarakat Indonesia di dalam kancah pergaulan antar bangsa. Sementara itu *Tujuannya*; 1. menghilangkan dikhotomi pemahaman antara ilmu-ilmu yang didasarkan atas keilmuan Islam dengan ilmu-ilmu sosial maupun sains dan engineering, maupun divergensi di antara ilmu-ilmu itu. 2. Melahirkan pemahaman atas perubahan masyarakat yang tidak terperangkap pada simptom dan gejala, tapi lebih menyangkut manusianya sendiri. Bentuk aktivitas dari penjabaran program ini berupa pembentukan kelompok diskusi terbatas yang terdiri dari ahli-ahli berbagai bidang ilmu dalam rangka membentuk konsep ilmu-ilmu sosial transformatif. Kelompok diskusi terbatas (*limited group*) itu adalah istilah lain dari *Pengajian Eksekutif*.

Tulisan ini lebih jauh akan dicoba arahkan untuk memotret lebih dekat Pengajian eksekutif ICMI Orwil Jatim sebagai implementasi dan penjabaran dari program nasionalnya. Itupun sebatas pada penggambaran terhadap lingkup materi bahasan dan sasaran kelompok kajian seperti akan digambarkan lebih lanjut.

Sebagai pengejawantahan dari pengembangan intelektualitas keislaman, pengajian eksekutif memiliki relevansi tersendiri, yakni wahana berdialog dan menggagas berbagai problematika keummatan dan ke-Islaman maupun problem riil kehidupan kontemporer dengan berbagai variasinya sebagai bagian dari agenda

kebangsaan yang mesti direspon melalui pewadahan mereka dari kalangan terbatas dari "orang-orang yang diundang".

B. MASALAH PENELITIAN

1. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemikiran di atas penulis melihat dua hal urgen yang perlu didiskripsikan:

- a. Siapakah peserta, orang-orang yang terlibat dalam pengajian sehingga dinamakan pengajian "eksekutif"? Dan dari lapisan sosiologis mana mereka berasal ?
- b. Apa saja topik dari kajian-kajian tematik yang diagendakan oleh model kajian Eksekutif dengan *audiance* dari mereka yang terseleksi itu, serta atas argumentasi apa tema-tema itu dipilih, dirumuskan dan dikaji sebagai bagian dari apa yang oleh tulisan ini dilihat sebagai gerakan intelektual.

2. Fokus Masalah.

Sebagai sebuah studi deskripsi tentu terbuka peluang dan kemungkinan untuk mengkaji obyek studi dari banyak sisi termasuk varisasi-variasi fenomenologis yang mencuat dan muncul secara alami. Namun sebagai sebuah studi empirik ia mesti memfokuskan diri pada batasan-batasan yang terukur dan teramati.

Pengajian eksekutif sebagai sebuah wahana diskusi terbatas tentu terikat oleh seperangkat elemen yang terlibat dan terkait di dalamnya yang terdiri dari peserta dan tema bahasan. Oleh karena itu penggambaran yang dilakukan dalam penelitian ini terfokus pada dua elemen terlibat itu beserta argumentasi-argumentasi logis atas dasar apa (parameter) kedua elemen terlibat tersebut dipilih, diseleksi dan dirumuskan.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Kajian dengan judul "Pengajian Ekskutif ICMI Orwil Jatim" ini bertujuan

- 1.1. Ingin mendapatkan diskripsi mengenai "mereka yang terbatas" dari *audiance* yang terlibat dalam pengajian eksekutif ICMI Orwil Jatim.
- 1.2. Ingin mendapatkan diskripsi rumusan-rumusan topik maupun kajian-kajian tematik yang diperuntukkan bagi mereka yang dipilih, diseleksi dan ditentukan itu.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- 2.1. Konseptual; Kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan wasasan untuk memperkaya pikiran dalam mengembangkan aneka kajian lainnya.

2.2. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai pengajian lain dengan model, sasaran, dan materi serta ruang-waktu yang lain dan berbeda.

D. KONSEPTUALISASI

Konsep merupakan unsur pokok yang harus terpenuhi dalam penelitian. Tanpa konsep suatu penelitian tidak memenuhi standard kualifikasi sebagai sebuah kerja intelektual yang diatur oleh prosedur dan tata aturan ilmiah. Penelitian demikian mungkin hanya sebatas pada identifikasi dan akumulasi data, namun tidak dapat ditarik inferensi akhir, sebab fakta-fakta itu berserakan dan tidak diikat oleh suatu abstraksi.

Urgensi konsep adalah untuk menggeneralisasikan fakta-fakta kasar itu menjadi abstraksi definitif. Dengan ini konsep dapat dijadikan pegangan pengamatan maupun pada proses-proses lebih lanjut penelitian. Secara sederhana konsep merupakan definisi dari sekelompok fakta maupun gejala yang teramati. Robert K. Merton, seperti dikutip Mely G. Tan, menegaskan "Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati" ⁽¹³⁾.

Dengan demikian penggunaan konsep secara benar dan tepat bukan saja secara formal merupakan standart baku yang harus terpenuhi dalam prosedur penelitian, melainkan lebih substansil ketepatan perumusan dan penggunaan konsep amat menentukan kadar dan derajat validitas produk penelitian. Meskipun demikian

¹³. Mely G. Tan dalam Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 21.

penelitian tidak dapat berhenti sebatas konsep. Sebab bagaimanapun ia masih general, abstrak yang perlu diperjelas dan diubah ke dalam bentuk yang dapat diukur secara empiris. Dengan bahasa lain konsep perlu diubah menjadi definisi operasional ⁽¹⁴⁾, yang tak lain adalah mengubah konsep-konsep berupa *construct* itu dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji sehingga dapat ditentukan kebenarannya oleh orang lain¹⁵.

Dengan ini, agar persoalannya tidak kabur serta menimbulkan deviasi, sehingga berujung pada distorsi penarikan kongklusi, penulis perlu mengurai secara definitif dari rangkaian judul "*Pengajian Eksekutif ICMI ORWIL Jatim*"

A. Pengajian

Berakar dari kata kaji, yang berarti ; pelajaran (terutama dalam hal agama), juga berarti penyelidikan dengan pikiran. Mendapat awal pen- dan akhiran -an menjadi bermakna; 1. ajaran, pengajaran. 2. Pembacaan Qur'an, 3. Penyelidikan (pelajaran mendalam)¹⁶. Pengajian merupakan wahana pembelajaran yang sudah menjadi tradisi yang khas dalam kehidupan kaum muslimin. Umumnya secara bersama mereka mengkaji dan mendialogkan pelbagai tema dan topik bahasan dan utamanya tema-tema keagamaan. Model ini berdaya resisten tinggi dan hampir ditemui dalam segenap

¹⁴. Mely G. Tan, Ibid, hlm. 23

¹⁵. Ibid, 23.

¹⁶. Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm. 433.

tingkatan dan lapis sosiologis kaum muslimin. Dengan model swadaya, membiaya diri sendiri dan relatif tidak diikat oleh aturan-aturan formal kelembagaan, namun ia bertahan dan tetap survive sehingga masih banyak ditemui di aneka ragam tempat. Kecenderungannya pengajian dikaitkan dengan momentum hari-hari besar keagamaan tertentu, namun tidak sedikit juga yang dirancang secara periodik dengan agenda dan bahasan terencana.

B. Eksekutif

Lazimnya terminologi eksekutif bertalian dengan politik sebagai salah satu unsur dari pembagian kekuasaan untuk membedakan dengan unsur yang lain, semisal legislatif dan Yudikatif. Ensiklopedi Indoensia misalnya membatasi pengertian eksekutif sebagai "badan pemerintahan suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahah dan perundang-undangan"⁽¹⁷⁾. Demikian juga Hasan Shadly⁽¹⁸⁾, membatasi eksekutif sebagai verbal " pelaksana, laksanakan, bisnisan (dalam perusahaan). Unsur bisnis terangkum dalam term eksekutif ditemui dalam Webster's ⁽¹⁹⁾ "to the execution of plans, projects, or bisnis interprise". Sebagai sifat ia

¹⁷. Ensiklopedia Indonesia, Buku Ihtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1990 hlm. 893.

¹⁸. Hasan Shadly, An English Indonesian Dictionary, Gramedia Jakarta, 1990, hlm. 223.

¹⁹. Webster's World University Dictionary, Publisher Company INC, Whashington, DC. 1965 hlm. 337.

berkenaan dengan hak untuk bertindak dan mengambil kebijakan dalam suatu struktur tertentu.

Eksekutif di sini tidak diidentikkan dengan pengertian politik maupun dalam konteks bisnis di atas. Melainkan lebih untuk menjelaskan bahwa background atau latar sosiologis dari unsur-unsur terlibat dalam pengajian eksekutif terdiri dari beragam profesi dan stratum sosial. Sebagian adalah orang-orang yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam makna luas, baik politik maupun bisnis serta sosial. Mereka adalah manager dalam masing-masing profesinya. Termasuk juga agamawan dan mereka yang turut peduli dan secara moral dan intelektual ikut bertanggungjawab terhadap agenda sosial dan problem riil keummatan maupun kebangsaan untuk dicarikan solusi tepat dari pelbagai lini dan dimensi pendekatan.

C. ICMI ORWIL Jatim

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) didirikan di Malang pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 1990²⁰. Organisasi ini menyebut dirinya sebagai bercorak kebudayaan dan bersifat keilmuan, kecendekiawanan, bercorak terbuka, bebas dan mandiri. Sedangkan asasnya Pancasila dengan tujuan meningkatkan mutu kecendekiawanan dan peran serta cendekiawan muslim se-Indonesia dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 45 guna mewujudkan tata kehidupan manusia yang damai, adil, sejahtera, lahir bathin yang diridloi Allah

²⁰. Lebih jelas lihat Anggaran Dasar ICMI Bab I, Pasal 2..

subhanahu wata'ala. Tentang struktur organisasi dijelaskan bahwa ICMI terdiri atas satuan dengan lingkungan setempat (lokal), wilayah dengan lingkup kawasan (regional) dan pusat dengan lingkup se-Indonesia (nasional).

Organisasi Wilayah (ORWIL), merupakan struktur organisatoris ICMI level daerah yang ada di tingkat propinsi. Orwil mengkoordinasikan beberapa organisasi satuan (ORSAT) level daerah di tingkat kabupaten dan kodya. Orwil Jatim demikian pula, merupakan pusat ICMI di lingkungan propinsi ini dengan beberapa Orsatnya. Fungsi Orwil dalam kaitan ikatan program dengan nasional adalah menggairahkan kehidupan dinamika keagamaan dan intelektualisme yang antara lain adalah melalui kajian-kajian periodik, termasuk pengajian eksekutif.

Pengajian eksekutif ICMI Orwil Jatim dalam konteks ini adalah *"pengajian periodik yang melibatkan kalangan dari beragam profesi dan mereka yang secara moral dan intelektual sebagai watak kecendekiawanannya peduli terhadap pelbagai agenda ummat dan bangsa untuk didekati dari aneka disiplin keilmuan yang secara berkala diselenggarakan oleh ICMI Orwil Jatim"*.